BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap pemerintahan baik itu pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat diperlukan komitmen untuk menjadikan pemerintahan tersebut berupa pemerintahan yang baik atau sering disebut *good governance*. Pemerintahan yang baik merupakan merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam komitmennya membangun suatu Negara maupun daerah sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Dalam upayanya untuk mencapai suatu pencapaian tersebut setiap pemerintahan harus dapat mengelola sumber daya yang ada, salah satunya yang terpenting adalah keuangan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dilaksanakan dengan terstruktur dan terencana agar suatu tujuan tertentu dapat terealisasi dengan baik dan sesuai dengan harapan atau tujuan yang telah direncanakan. Karena pada dasarnya dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan yang baik tersebut tidak selamanya berjalan dengan baik pula, akan muncul permasalahan yang mendasar seperti halnya permasalahan mengenai kemampuan perangkat daerah dalam mengelola serta menyajikan data keuangan kedalam sebuah bentuk laporan yang diterima umum dan kemampuan pemerintahan dalam mengelola sumber daya lain yang dimiliki serta sistem yang diterapkan. Hal inilah yang mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal ini SKPD untuk menerapkan akuntabilitas publik.

Saat ini peran masyarakat dalam pemerintahan berperan sangat besar, dibuktikan dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal pelaksanaan perekonomian suatu Negara dan/atau daerah. Di era masyarakat yang terbuka saat ini dimana meningkatnya teknologi dan informasi yang mampu membantu masyarakat menjadi semakin cerdas, begitupula dalam hal pengelolaan keuangan. Sehingga perlu adanya pelaporan yang memiliki kualitas dan transparansi pelaporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis untuk dapat memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola. Laporan keuangan daerah disediakan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan. Adapun laporan keuangan yang mengandung informasi akuntansi harus memenuhi empat karakteristik laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Kualitas informasi dalam laporan keuangan sangat diperhatikan. Karena itu, setiap penyusunan laporan keuangan diperlukan suatu sistem yang dapat menjadikan acuan dan pedoman yang menjamin standarisasi suatu pelaporan. Hal ini dapat dilakukan dengan berpedoman terhadap standar pelaporan keuangan yang akan berguna bagi penyusunan pelaporan keuangan. Di pemerintahan, kualitas informasi laporan keuangan dipengaruhi selain dari sumber daya manusia, juga dipengaruhi oleh seberapa handal standar akutansi yang diterapkan. Maka dari itu, salah satu cara untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah penyusunan laporan keuangan yang berpedoman terhadap standar akuntansi pemerintah. Khususnya Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah yang

mengikuti perkembangan era teknologi informasi yang modern, seperti pentingnya pemanfaatan alat-alat teknologi informasi sebagai kebutuhan primer saat ini.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Peraturan tersebut tercantum dalam peraturan pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP tahun 2005) yang sekarang telah mengalami perubahan dan pergantian menjadi peraturan pemerintah No. 71 tentang Standar Akutansi Pemeritahan Berbasis Akrual (SAP 2010).

Para pengguna laporan keuangan diluar organisasi mampu memahami informasi yang disajikan di laporan keuangan jika laporan keuangan tersebut disajikan melalui kriteria/persepsi yang dapat dipahami secara bersama. Selain itu, dalam menyajikan informasi dalam bentuk laporan keuangan diperlukan pemanfaatan akses informasi dan teknologi yang dimiliki dan digunakan oleh instansi terkait sehingga sasaran pencapaian tujuan dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Dengan berbagai kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan tersebut. Pemerintah wajib menyajikan informasi keuangan negara secara terstruktur dan sistematis serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga seluruh informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat digunakan sebagai dasar dalam membuat perencanaan, melakukan pengendalian dan pengambilan keputusan, terutama bagi pemerintah serta masyarakat sebagai pembayar pajak dan pemberi amanat pengelolaan keuangan negara.

Pada instansi pemerintahan, khususnya di pemerintah daerah masih terdapat masalah dan fenomena bahwa laporan keuangan pemerintah daerah belum mampu menyediakan informasi yang sesuai dengan peraturan dan/atau data yang kurang akurat disebabkan tidak terstrukturnya segala proses pengelolaan keuangan daerah sehingga kualitas pelaporan tidak andal dan bahkan tidak tepat waktu.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dari berbagai artikel yang tersebar luas di situs-situs resmi internet, ternyata didalam laporan keuangan pemerintah daerah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Pemerintah. Masih banyaknya laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Pemerintah membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance government) meningkat. Hal itu juga yang mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik.

Berikut merupakan data perkembangan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

Tabel 1.1 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2012-2016

LKPD	Opini								Jumlah
(Tahun)	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2012	34	6,5	343	65,5	26	5	119	25	522
2013	67	12,5	349	66,5	8	2	100	19	524
2014	120	22,5	319	60,5	6	2	79	15	524
2015	156	30	311	59	11	2	46	9	524
2016	251	50	230	45,5	4	1	19	3,5	505

(sumber: www.bpk.go.id/IHPS-1-tahun-2016)

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa memang kondisi LKPD dari tahun ke tahun semakin membaik, tapi angka opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) masih jauh lebih tinggi dibanding opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Oleh karena itu, pemerintah daerah masih perlu meningkatkan kompetensi dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar. Penyajian suatu laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pertanggungjawaban keuangan yang lebih baik. Berdasarkan fenomena tersebut, dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih banyak yang belum memenuhi kriteria nilai informasi yang berkualitas.

Rendahnya kualitas informasi laporan keuangan di era kemajuan di segala bidang saat ini, sangat tidak efektif atas nilai informasi yang akan dapat dipertanggungjawabkan. Masih banyak pihak-pihak yang belum memahami pentingnya nilai informasi di dalam suatu laporan keuangan yang harus memuat karakteristik kualitatif laporan keuangan. Hal tersebut didorong dari sistem yang tidak dijalankan dan tidak adanya atau belum maksimalnya penerapan suatu sistem yang memiliki fungsi perencanaan, pemrosesan dan output yang dihasilkan yang

bisa saja disebabkan karena sumber daya manusia yang belum memahami pentingnya suatu nilai kuaitas dari laporan keuangan.

Hal-hal yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi dipandang sebagai alat yang digunakan oleh individu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 atas perubahan PP No. 56 Tahun 2005 tentang sistem Informasi keuangan daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 tahun 2001.

Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemerosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan penghitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, biaya pemerosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing*, namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah murah. Terlebih jika teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal.

Pentingnya teknologi informasi yang digunakan pada pemerintah di daerah memerlukan penyempurnaan dan pengefektifan pemanfaatan teknologi informasi tersebut mengingat masih terdapat masalah yang terjadi di hampir sebagian besar daerah di Indonesia dikarenakan masih belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan pemeritahan daerah. Situasi tersebut cukup masuk akal dikarenakan masih banyaknya sumber daya manusia yang belum mampu mengomptimalkan implementasi teknologi dalam pengelolaan keuangan di suatu organiasai, baik swasta maupun pemerintahan.

Ukuran kinerja masih didominasi oleh *output*, sedangkan yang menyangkut efisiensi, efektifitas, kualitas jasa dan kepuasan publik ternyata belum sepenuhnya dijalankan. Selain itu, informasi laporan keuangan yang belum berkualitas mengakibatkan informasi keuangan tersebut belum banyak digunakan untuk melakukan tahap-tahap perencanaan strategis, alokasi sumber daya, dan pelaporan bagi perencanaan selanjutnya. Sehingga hanya sebatas pelaksanaan sistem pemerintahan dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan tidak diikuti dengan laporan keuangan yang berkualitas sebagai hasil akhir dari bentuk pertanggungjawaban sumber daya ekonomi pada pemerintahan tersebut.

Penelitian mengenai pengaruh implementasi teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan telah banya dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Celviana Winidyaningrum dan Rahmawati mengenai PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KETERANDALAN DAN KETEPATWAKTUAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. Penelitian ini menunjukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan dan ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi

informasi dalam pengolahan data memiliki keunggulan dari sisi kecepatan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Stevani I. Dagong dengan judul "PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KOTA GORONTALO". Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan. Selain itu, pengetahuan pengelola dan ketersediaan sarana dan prasarana juga berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, yaitu telah memenuhi karakteristik laporan keuangan yang baik, diantaranya relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurul yuniar Lediana mengenai "PENGARUH EFEKTIVITAS PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi). Menunjukan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara penerapan teknologi informasi terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintahan daerah Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan uraian diatas dan pemahaman atas jurnal terdahulu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dan mendalam mengenai "PENGARUH IMPLEMENTASI TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH". Guna untuk mengetahui bagaimana efektivitas implementasi teknologi informasi pada

pemerintah Kota Sukabumi, bagaimana kualitas laporan keuangan pemerintah Kota sukabumi dan bagaimana pengaruh implementasi teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Sukabumi.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

- 1. Sistem pengendalian Internal belum optimal.
- Sumber daya manusia yang belum memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya.
- 3. Tidak adanya pelatihan dan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan saat ini dan Peraturan Pemerintah yang terbaru.
- 4. Standar Operasional Prosedur pengelolaan aset pada SKPD belum Efektif diterapkan.
- 5. Teknologi Informasi belum dimanfaatkan secara efektif.
- 6. Penggunaan teknologi yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan.

1.2.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- Sejauh mana implementasi teknologi informasi diterapkan di Pemerintah kota Sukabumi?
- 2. Sejauh mana pencapaian kualitas laporan keuangan pemerintah kota sukabumi?
- 3. Bagaimana Pengaruh Implementasi Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasakan Rumusan Masalah, maka pada penilitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- Untuk mengetahui bagaimana implementasi teknologi informasi pada Pemerintah kota Sukabumi.
- 2. Untuk mengetahui bagaimana kualitas laporan keuangan pemerintah kota sukabumi.
- Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Implementasi Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi.

1.3.2 Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek teoritis

Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam dari teoriu yang telah dikatahui dengan kenyataan yang terjadi. Sedangkan bagi dunia akademis, diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian selanjutnya, yang diharapkan dapat menjadi sumbangan untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

2. Aspek praktis

Penelitian ini bisa bermanfaat bagi Pemerintah Daerah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan saran serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.